

ABSTRAK

Kewenangan notaris sebagai konsultan HAKI belum ada dasar hukumnya sehingga hal ini dapat dianggap melanggar kode etik profesi Notaris yang harus menjaga martabat dan menjalankan tanggung jawab pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang ada. Sebagai permasalahan dalam tesis ini: 1) apakah Notaris berwenang melaksanakan fungsi sebagai konsultan HAKI khususnya dalam pendaftaran merek? dan 2) apa akibat hukum yang dapat timbul atas fungsi yang dijalankan Notaris sebagai konsultan HAKI?.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama. Sedangkan sumber data primer digunakan hanyalah sebagai unsur pendukung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) notaris berwenang melaksanakan fungsi sebagai konsultan HAKI khususnya dalam pendaftaran merek, dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 UUJN tentang Jabatan Notaris dimana notaris juga memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang lainnya. 2) belum adanya kejelasan mengenai kewenangan Notaris baik dari Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Undang-Undang tentang Merek, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa dikemudian hari.

Saran diharapkan Direktorat Jenderal HAKI dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan Konsultan HAKI dalam membantu masyarakat untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya seperti hak cipta, merek, ataupun lainnya serta pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan secara jelas tentang Notaris yang melakukan fungsi sebagai Konsultan HAKI khususnya dalam pendaftaran merek agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan Notaris dapat mempertanggungjawabkan tugasnya.

Kata Kunci : Kewenangan, Notaris, Konsultan HAKI, Pendaftaran Merek

ABSTRACT

The authority of a notary as an Intellectual Property Rights consultant has no legal basis and it is considered to violate the Notary's professional code of ethics because Notary has to follow and keep their Notarial ethics based on existing Code of Ethics. As problems in this thesis: 1) is the notary authorized to carry out the function as an Intellectual Property Rights consultant, especially in mark registration? And 2) what are the legal consequences that may arise from the functions performed by a Notary as an Intellectual Property Rights Consultant?.

The method used in writing this thesis is a normative juridical approach. The specification used for this research is descriptive analytical breakdown specifications. The data source used is the secondary data made as main data source. Meanwhile, the primary data source is used only as a supporting element. The method of data collection in this research was carried out by means of literature study and document study. Furthermore, the data were analyzed using qualitative analysis techniques.

The results show that 1) notary has the authority to function as an intellectual property rights consultant, especially in trademark registration, in this case it is explained in Article 1 UUJN, the notary also has other powers based on other laws. 2) there is no clarity regarding the authority of a Notary either from the Law on the Position of Notary Public or the Law on Marks, so there is the possibility of a dispute in the future.

Suggestions are to have expectation for the Directorate General of Intellectual Property Rights can socialize information to the public about existence of Intellectual Property Rights Consultants in helping the public to protect their Intellectual Property Rights such as copyrights, trademarks, or others and the Government is expected to have a clearer regulations related to Notary perform activities as an Intellectual Property Rights Consultants, especially in trademark registration to ensure the implementation runs well and the notaries can be accountable in performing their duties.

Keywords: Authority, Notary, Intellectual Property Rights Consultant, Trademark Registration